

# Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Ela Andini<sup>1</sup> Evi Zubaidah<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
[elaandini@student.uir.ac.id](mailto:elaandini@student.uir.ac.id) [evizubaidah@soc.uir.ac.id](mailto:evizubaidah@soc.uir.ac.id)

Received : 09 Juni 2025

## Abstract

This study aims to determine the Implementation of Building Construction Approval (PBG) at the Public Works and Spatial Planning Department of Pekanbaru City. Problems that occur at the Department in the management flow and problems in the community in managing the Implementation of Building Construction Approval. This type of research is a descriptive qualitative method with collection techniques through interviews, observation and documentation. The Key Informant Data Collection Technique and informants were carried out using Purposive Sampling. The Implementation Theory that the author uses is Charles O'Jones that Implementation is identifying program implementation or policy implementation, there are three types of activities that need to be considered carefully, namely organization, Interpretation, Application. The results of this study indicate that the Implementation of Building Approval (PBG) at the Public Works and Spatial Planning Agency of Pekanbaru City In the organization.

**Keywords: Implementation, Policy, Building Construction Approval**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Masalah yang terjadi Pada Dinas dalam alur pengurusan serta masalah pada masyarakat dalam melakukan pengurusan dalam Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif metode kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Penarikan Data Key Informan dan informan dilakukan dengan Purposive Sampling. Teori Implementasi yang penulis gunakan adalah charles O'Jones bahwa Implementasi adalah mengidentifikasi implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni organisasi, Interpretasi, Penerapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Pada organisasi yaitu sumber daya organisasi masih kurang, serta dalam interpretasi pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terdapat masalah beberapa pegawai dan masyarakat belum bisa mengikuti petunjuk yang telah disediakan, serta pada penerapan pada pelaksanaan prosedur kerja masih kurang berjalan lancar dikarenakan para pegawai atau karyawan masih belum maksimal mengoperasikan hal tersebut.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung**

## Pendahuluan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Kebijakan pembangunan daerah adalah serangkaian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengelola pembangunan dalam suatu wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan bangunan gedung, fungsi dari bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung atau disingkat dengan IMB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan bangunan (IMB) semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang sebelumnya dikenal dengan IMB kini diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG merupakan "Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangkan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung." (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau PP

16/2021). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Anggaran untuk PBG bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis proyek, tetapi proses pengajuan dan evaluasi biasanya berlangsung dalam 28 hari. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya:

1. Adanya suatu kepastian hukum;
2. Perlindungan kepentingan hukum;
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
4. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Sasaran PBG adalah pemilik bangunan yang ingin membangun, mengubah, atau merawat gedung sesuai standar teknis. Tujuan utama PBG adalah memastikan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meski serupa, IMB dan PBG memiliki beberapa perbedaan. Berikut selengkapnya Perbedaan IMB dan PBG.

1. IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin.
2. PBG lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus didirikan. Dalam aturan PBG, bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung serta pemanfaatan bangunan gedung.
3. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), dan ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH).
4. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen, serta ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Proses yang dilakukan dalam 28 hari tersebut meliputi:

1. Pengajuan
2. Pemeriksaan Rencana Teknis
3. Perhitungan Retribusi
4. Penerbitan PBG

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kemen PUPR meluncurkan layanan SIMBG berbasis web untuk mempermudah masyarakat memperoleh izin Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, Sesuai dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan

terbitnya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian. Menindak lanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). layanan yang dapat diakses melalui SIMBG berbasis web ini di antaranya izin PBG, Sertifikat Laik Fungsi atau SLF Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung Terbangun Maupun Belum berdasarkan Basis Data Tim Profesi Ahli (TPA), dan Lisensi Arsitek.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Menurut Sondang P. Siagian (2008;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari tahu dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi (dalam Syafiie, 2003;4).

### **Konsep Adminitrasi Publik**

Menurut Sjamsuddin (2016;105) administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris publik administration yang sering juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam kamus Webster (1966) publik administration diartikan sebagai: "*branch of political science dealing*."

R.C. Chandler dan J.C Plano administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan - keputusan dalam kebijakan publik

### **Konsep Organisasi**

Menurut Armosudiro dalam Fithriyyah (2021) organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua orang atau lebih yang mempunyai kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu dan secara bersama-sama guna tercapainya sasaran atau tujuan tertentu.

Menurut Robbins dalam Fahmi (2013) organisasi sektor publik adalah kesatuan sosial yang dikelola secara sadar, dengan batasan yang dapat diidentifikasi, dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama yang telah dibuat sebelumnya.

### **Konsep Manajemen**

Manajemen menurut R.W. Morell dalam bukunya "*Management : Ends and Means*" menuliskan "*Manajemen adalah aktivitas dalam organisasi, terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran ) suatu organisasi , dan penentuan sarana-sarana untuk mencapaisasaran secara efektif.*"

George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.

### **Konsep Prinsip Kebijakan**

Menurut Parsons (2002:15) kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan

Beberapa bidang kebijakan publik meliputi berikut; kajian perilaku birokrasi dan elit politik berkaitan dengan kebijakan yang akan diputuskan. Peran kelompok kepentingan dalam proses politik biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kekhawatiran umum dan isu-isu yang ada di antara para aktor politik dan yang terlibat di proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

### **Konsep Implementasi**

Menurut Jones (1996:296) "Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136) menamakan model implementasi kebijakannya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on implementation*. Dalam pendekatannya yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat 4 (empat) *variable* yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

### **Metode**

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draf RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal dan 79 Undang-Undang terdampak dan salah satu Undang-Undang yang diubah di dalam RUU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002). Pasal 25 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai perubahan UU No. 28/2002 yaitu tentang Persetujuan Bangunan Gedung, standar teknis bangunan gedung, pihak penyelenggara bangunan gedung, prosedur, wewenang dan sanksi.

### **Konsep SIMBG**

Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) adalah system aplikasi berbasis website yang di desain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah Daerah. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) merupakan wujud dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah nya baik dalam proses penyelenggaraan PBG atau SLF sertakontribusi besar dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Serta tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Izin mendirikan bangunan, transparansi pelayanan yang tinggi serta Sertifikat PBG yang dapat menjadi pedoman untuk membangun bangunan dengan konstruksi yang optimal. SIMBG dapat di akses melalui website resmi <https://simbg.pu.go.id/>.

### **Konsep PBG**

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP 16 / 2021, PBG di definisikan sebagai berikut: Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai objek penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan Penelitian tentang Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut :

### **Organisasi**

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam setiap Organisasi Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Dimana organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya dalam indikator organisasi bahwasanya organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja masih adanya beberapa kekurangan di antaranya Dalam struktur organisasi dengan struktur yang sudah ada tersebut dan di tetapkan sebelumnya dapat menginformasikan sudah berjalannya kebijakan PBG ini dengan baik, dimana para pegawai tersebut sudah memiliki SK masing masing yang di keluarkan oleh walikota Pekanbaru, namun ada beberapa masalah dimana dari sistem yang di tetapkan tersebut adanya ketidak sesuaian sistem yang mengakibatkan jumlah waktu dalam pengurusan PBG ini bertambah sehingga membuat kurang efektifnya dalam pengurusan kebijakan ini serta dengan peningkatan koordinasi untuk membuat keefektifan dalam pengurusan PBG ini. Namun secara umum dengan struktur organisasi ini sudah bisa membantu dalam menjalankan kebijakan PBG tersebut di kota Pekanbaru.

sumber daya manusia dalam Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adanya kekurangan dalam sumber daya manusia dalam pengurusan PBG dimana sistem yang dikerjakan secara keroyokan sehinggah membuat kurangnya keefektifan kerja serta respon yang kurang kepada masyarakat yang memililiki masalah dalam pengurusan PBG, namun pegawai atau pekerja mengusahakan semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan PBG di SIMBG melalui petunjuk tata cara dan syarat pengurusan PBG untuk masyarakat tersebut. Meskipun masih ada kekurangan dalam sumber daya manusia yang ada sehinggah membuat implementasi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pekanbaru masih

dalam proses menuju arah yang lebih baik, baik dalam pelayanan, maupu kualitas sumber daya manusia yang ada.

peralatan dan perlengkapan dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat beberapa kekurangan dimana perlengkapan seperti komputer, dan jaringan masih memiliki masalah semenjak kejadian kebakaran sebelumnya, sebelum kebakaran tersebut alat-alat dan perlengkapan yang ada sudah memadai serta dapat mendukung dalam kinerja para pegawai atau pekerja dalam pengurusan PBG. Dimana peralatan tersebut menggunakan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan setelah terjadinya kebakaran para pekerja atau pegawai menjadi kesulitan karena dalam melakukan pekerjaan mereka menggunakan sisa komputer yang ada atau laptop sendiri.

### **Interpretasi**

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam Interpretasi menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Dimana Interpretasi mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya Dalam indikator interpretasi harus memiliki peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dalam peraturan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah membantu dalam mendorong terealisasikannya kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), peraturan tersebut sudah mencakup aturan-aturan tentang bangunan gedung serta diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mendorong masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimana peraturan tersebut tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terdapat pada PP No 16 th 2020 tentang pelaksanaan undang-undang no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Dalam Petunjuk Pelaksana dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tersebut terdapat dalam SOP yang di keluarkan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), SOP tersebut bisa di donwload dalam bentuk *soft file*, SOP ini sebagai petunjuk untuk para pegawai atau karyawan dalam melakukan pekerjaan mengolah data agar dari dokumen dari para pengurus serta membantu para pegawai atau karyawan memanfaatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dan masih ada beberapa karyawan yang masih belum bisa mengikuti SOP yang ada di karena kurangnya kemampuan karyawan tersebut dalam mengoperasikan sistem sesuai dengan SOP tersebut serta SOP ini juga diberikan untuk para pengurus yang mengajukan PBG sebagai arahan tata cara pengurusan bangunan gedung tersebut.

Petunjuk Teknis dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tersebut sudah membantu para karyawan dalam mengerjakan sistem sudah ada dengan pekerjaan masing-masing telah ditetapkan pada karyawan tersebut, namun masih ada beberapa karyawan yang tidak bisa menggunakan sistem tersebut atau masih kurangnya kemampuan karyawan tersebut dalam

menjalankan sistem itu serta teori yang ada masih kurang relevan dengan hasil lapangan. Serta bagi masyarakat standar teknis tersebut sudah menjadi patokan apa saja yang akan dilakukan masyarakat tersebut mulai dari pengajuan yang akan dilakukan sampai akhirnya penerbitan tersebut akan dikeluarkan, namun masyarakat masih kurang paham namanya teknologi sehingga masih ada beberapa masyarakat yang masih terkendala dalam standar teknis tersebut.

### **Penerapan**

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam penerapan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dalam penerapan peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya Dalam indikator penerapan harus memiliki prosedur kerja, program kerja, jadwal kegiatan disiplin, dan adanya sosialisasi dimana bahwasanya Prosedur Kerja dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan ditetapkan pada sistem sudah dikerjakan sesuai prosedur tersebut namun dari prosedur kerja tersebut hanya sebagai aturan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan masih ada ketidaksesuaian dengan hasil kerja lapangan. Bagi masyarakat prosedur kerja yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai namun masyarakat masih terkendala dalam ketidakpuasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini diantaranya masyarakat lebih mengerti dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pada pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kurang mengertinya masyarakat dalam mengaplaod berkas secara online melalui sistem. Dapat dilihat prosedur kerja sudah cukup baik dalam merealisasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru.

Program Kerja dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang telah disahkan oleh pemerintah sesuai dengan SK yang telah ditetapkan yaitu SK SIMBG, SK TPA, SK TPT, SK Penilik yang di keluarkan melalui keputusan wali kota pekanbaru sudah baik dalam memberikan kinerja yang baik kepada para karyawan. Sebaliknya pada masyarakat program kerja Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini sudah cukup baik tapi masih ada masyarakat yang masih suka dengan program kerja Izin Mandirikan Bangunan Gedung (IMB) yang pengurusannya secara langsung atau *offline* dibandingkan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini secara *online*, serta respon pegawai dalam memberikan tanggapan atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusannya dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini melalui sistem yang telah disediakan.

Jadwal Kegiatan Disiplinan dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah ada, namun para pegawai atau karyawan memberikan dispensasi atas keterlambatannya ketika waktu keterlambatan itu sedikit, namun ketika keterlambatannya lama serta sering lambatnya datang maka diberikan sebuah peringatan kepada yang bersangkutan, dan kedisiplinan dapat dilihat dari hasil kinerja para pegawai serta pendapat masyarakat terhadap pengurusan yang mereka lakukan. Masyarakat pada umumnya tidak tahu atas jadwal kedisiplinan namun masyarakat masih kurang puas atas respon yang diberikan oleh para pegawai atau karyawan

atas masalah yang mereka laporkan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh karena itu dari hasil wawancara dapat disimpulkan secara umum jadwal kegiatan disiplin sudah berjalan baik namun masih ada beberapa masalah terutama masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sosialisasi dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang dilakukan masih kurang terutama kepada para individu serta sosialisasi lebih berfokus kepada para pengembang perumahan, faktor mempengaruhi sosialisasi tersebut berada pada masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang teknologi dimana sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial seperti instagram tiktok, berita. Sosialisasi lebih mengarah kepada masyarakat ketika masyarakat individu tersebut datang secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dimana masyarakat tersebut mendapatkan informasi tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan masih kurang dimana tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum berjalan maksimal dikarenakan terdapat beberapa sub indikator dari tiga indikator yang ada dari proses implementasi yang belum terlaksana dengan baik indikator Organisasi dimana pada sumber daya dan peralatan dan alat-alat kerja masih bermasalah, dan pada indikator Interpretasi masih ada Petunjuk Pelaksanaan dan yang bermasalah. Serta Pada Indikator bermasalah yaitu Program Kerja, Jadwal Kegiatan Disiplin dan Sosialisasi yang membuat Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru akan menjadi lebih baik kedepannya melalui evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk menunjang terealisasinya Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal:**

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Jones, C. O. (1991). *Kebijakan Publik*. Jakarta Utara: Rajawali.
- Parera, A. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- syafri, w. (2012). *studi tentang administrasi publik*. Jakarta: erlangga.

- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Candra, A. C., & Dinata, S. (2022). Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. *Jurnal Perangkat Lunak*, 4(3), 160–171. <https://doi.org/10.32520/jupel.v4i3.2408>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Aminudin., Suryani, B., Kambolong, M., & Nurzakinah, S. (2024). Transformasi E-Government dalam Persetujuan Bangunan Gedung: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung ( SIMBG ) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 7(2), 765–779.
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Kata Kunci. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1), 9–18. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>
- ITS, urnal S. dan S. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 252. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>
- Lutfi, M., & Bogor, U. D. (2024). Jurnal Manajemen Dinamis EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG ( SIMBG ) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ( PBG ) DI Jurnal Manajemen Dinamis. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(2), 36–50.
- Maggara, T. S., & Frinaldi, A. (2023). Dampak Perubahan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Padang Pariaman. *Ahkam*, 2(4), 895–900. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2419>
- Agus Candra, A. C., & Dinata, S. (2022). Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. *Jurnal Perangkat Lunak*, 4(3), 160–171. <https://doi.org/10.32520/jupel.v4i3.2408>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Aminudin., Suryani, B., Kambolong, M., & Nurzakinah, S. (2024). Transformasi E-Government

dalam Persetujuan Bangunan Gedung: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung ( SIMBG ) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 7(2), 765–779.

- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Kata Kunci. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1), 9–18. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>
- ITS, urnal S. dan S. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 252. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>
- Lutfi, M., & Bogor, U. D. (2024). Jurnal Manajemen Dinamis EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG ( SIMBG ) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ( PBG ) DI Jurnal Manajemen Dinamis. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(2), 36–50.
- Maggara, T. S., & Frinaldi, A. (2023). Dampak Perubahan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Padang Pariaman. *Ahkam*, 2(4), 895–900. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2419>
- Muspawi, M., Janati, S., Panjaitan, K., & Dwi Mawarni, J. (2023). Menelaah Konsep-Konsep Dasar Organisasi. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 5(2), 154–167. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v5i2.717>
- Nasiratunnisaa Mallappiang, Rifdan, & Hamsu Abdul Gani. (2023). Akuntabilitas Proses Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. *Seminar Nasional Dies Natalis 62, 1*, 297–308. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.827>
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional

Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota

Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi*

*Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of

Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi

Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Panduan, B., & Penyusun, T. I. M. (n.d.). Buku panduan.
- Parta, N. P. W. (2023). Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12(2), 1. <https://ppid.dpmpptsp.jatengprov.go.id/sarpras/3/29>
- PRATIWI, S. (2023). Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Juni 2023. [https://repository.unsri.ac.id/125573/4/RAMA\\_63201\\_07011381924137\\_0001057901\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/125573/4/RAMA_63201_07011381924137_0001057901_01_front_ref.pdf)
- Putra, A. ., & Dewi. M.F. (2023). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 226–237. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3618>
- Rahayuningtyas, M., Ningrum, E., Kusumawardana, H., & Hariadi, W. (2023). Implementasi

Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Purbalingga. *Wijayakusuma Law Review*, 5(2), 31–38. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i2.253>

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rohalia, D. R., & Meilani, L. N. (2023). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4517–4525. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>
- S-, J., & Http, I. (n.d.). PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <http://jurmafis.untan.ac.id> ; <http://jurnalmhhsfisipuntan.co.nr>. S-1 Ilmu Administrasi Publik, 3, 1–18. [https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2625/pdf\\_783](https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2625/pdf_783)
- Shalma, S. H. P., & Putri, N. E. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.63>
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *Publika*, 3(1), 89–101.
- Susanti, M., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) Berbasis Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Syarifah, D., Astuti, R. S., & Kismartini, K. (2022). Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG. *Matra Pembaruan*, 6(2), 119–131. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.119-131>
- Tresiana, N. (2021). Implementasi Kebijakan (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi). [http://repository.lppm.unila.ac.id/38253/1/Implementasi Kebijakan Publik %28Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/38253/1/Implementasi%20Kebijakan%20Publik%20Pentingnya%20Kapital%20Sosial%20dan%20Koproduksi%29.pdf)

#### **Dokumentasi :**

Undang-undang Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Dengan Undang-undang yang pelaksanaan di Daerah Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Daerah

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung Kota Pekanbaru

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penugasan Anggota Sekretariat Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Kota Pekanbaru, Serta Menunjuk Pemegang Hak Akses, Pengawas dan Operator Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kota Pekanbaru.

Keputusan Wali Kota Kota Pekanbaru Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Teknis Persetujuan Bangunan Gedung Kota Pekanbaru

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung Kota Pekanbaru